

# ANALISIS KEMISKINAN DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PROVINSI MALUKU

Virli Triadinda Taluku

NPP. 32.1011

*Asdaf Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku  
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: [32.1011@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1011@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Sutiyo, S.STP., M.Si., Ph.D

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The problem addressed in this study is the high poverty rate in Southwest Maluku Regency, which reached 28.78% in 2023, making it the highest in Maluku Province. Despite the government's implementation of various poverty alleviation programs, the poverty rate has shown inconsistent fluctuations, recorded at 29.43% in 2019, 29.15% in 2020, 29.55% in 2021, and 27.64% in 2022. This instability highlights the need for a deeper understanding of the underlying causes of poverty in this region. **Purpose:** This study aims to identify the dominant characteristics of poverty in Southwest Maluku Regency along with its causal factors. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach, using data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The informants in this study numbered 17 people, consisting of regional apparatus and the community. **Result:** The findings indicate that the dominant characteristic of poverty is structural poverty, which is reflected in three key indicators: (1) social injustice through uneven program distribution (food assistance realization only 93% of the target), (2) economic class gaps between civil servants (Rp 2.5 million/month) and fishermen/farmers (Rp 500,000-1 million/month), and (3) limited infrastructure access (less than 40% of roads in good condition, with 10 sub-districts lacking electricity access). **Main Causal Factors:** Two mutually reinforcing dimensions contribute to this situation: (1) poverty itself (low income of Rp 50,000-100,000/day, limited productive assets) and (2) geographical isolation (48 islands scattered across 17 sub-districts, with transportation available only 1-2 times per week, and goods prices 20-30% higher). **Other Characteristics:** Natural and cultural poverty are not dominant, nor are factors of physical weakness, vulnerability, and powerlessness. **Conclusion:** The dominant characteristic of poverty in Southwest Maluku Regency is structural poverty. The main causes of this structural poverty are the long-standing condition of poverty itself and geographical isolation. Recommended mitigation efforts include the development of an integrated island-based transportation system, the development of island-cluster-based value chains, strengthening the integrated public service system, developing local institutional capacity, and diversifying the economy based on local potential. **Keywords:** Structural Poverty, Poverty Trap, Southwest Maluku Regency, Archipelago Region.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang mencapai 28,78% pada tahun 2023, menjadikannya yang tertinggi di Provinsi Maluku, di mana meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan menunjukkan fluktuasi yang tidak konsisten dari 29,43% pada 2019, 29,15% pada 2020, 29,55% pada 2021, dan 27,64% pada 2022, sehingga ketidakstabilan ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab mendasar kemiskinan di daerah ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan yang dominan di Kabupaten Maluku Barat Daya beserta faktor-faktor penyebabnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang, terdiri dari perangkat daerah dan masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kemiskinan yang dominan adalah kemiskinan struktural, yang ditandai dengan tiga indikator utama: (1) ketidakadilan sosial berupa distribusi program yang tidak merata (realisasi bantuan pangan hanya 93% dari target), (2) kesenjangan kelas ekonomi antara PNS (Rp 2,5 juta/bulan) dengan nelayan/petani (Rp 500 ribu-1 juta/bulan), dan (3) keterbatasan akses infrastruktur (kurang dari 40% jalan dalam kondisi baik, 10 kecamatan tanpa akses listrik). Faktor Penyebab Utama: Dua dimensi saling menguatkan yaitu (1) kemiskinan itu sendiri (pendapatan rendah Rp 50.000-100.000/hari, keterbatasan aset produktif) dan (2) isolasi geografis (48 pulau tersebar di 17 kecamatan, transportasi 1-2 kali/minggu, harga barang 20-30% lebih mahal). Karakteristik Lainnya: Kemiskinan natural dan kultural tidak dominan, begitu pula faktor kelemahan fisik, kerentanan, dan ketidakberdayaan. **Kesimpulan:** Karakteristik kemiskinan yang dominan di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kemiskinan yang bersifat struktural. Faktor penyebab utama dari kemiskinan struktural di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kondisi kemiskinan itu sendiri yang sudah berlangsung lama dan kondisi isolasi geografis. Rekomendasi upaya penanggulangan mencakup pengembangan sistem transportasi terintegrasi berbasis kepulauan, pengembangan rantai nilai berbasis klaster pulau, penguatan sistem pelayanan publik terpadu, pengembangan kapasitas kelembagaan lokal, dan diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal. **Kata kunci:** Kemiskinan Struktural, Perangkat Kemiskinan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Wilayah Kepulauan.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hutasoit (2017) dalam bukunya "Pengantar Ilmu Kependudukan" menjelaskan bahwa masalah kemiskinan merupakan salah satu isu kependudukan yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga sosial dan politik. Kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan studi kependudukan dan administrasi kependudukan. Menurut Weeks (2020), kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas penduduk. Kualitas penduduk mengacu pada karakteristik non-demografis seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang memengaruhi kesejahteraan dan potensi kontribusi individu terhadap masyarakat. Kemiskinan

mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya, peluang, dan layanan dasar termasuk administrasi kependudukan. Penduduk yang hidup dalam kemiskinan seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan pencatatan sipil seperti akta kelahiran, kartu identitas, dan dokumen kependudukan lainnya. Kondisi ini dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar serta dinamika demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Menurut Ferreira et al. (2015), kemiskinan dan ketidaksetaraan memiliki hubungan yang erat, di mana peningkatan ketidaksetaraan dapat memperburuk kondisi kemiskinan di berbagai negara. Jäntti et al. (2019) meneliti dampak kebijakan sosial terhadap pengurangan kemiskinan dan menemukan bahwa intervensi yang tepat dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Alkire dan Santos (2014) mengembangkan pendekatan multidimensional untuk mengukur kemiskinan, yang mencakup berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Psacharopoulos dan Patrinos (2018) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan, dengan investasi dalam pendidikan menghasilkan pengembalian yang tinggi bagi individu dan masyarakat. Satterthwaite (2016) membahas tantangan kemiskinan di wilayah perkotaan dan menekankan pentingnya perencanaan kota yang inklusif untuk mengatasi masalah ini.

Penelitian oleh Davis (2017) menyoroti tantangan kemiskinan perkotaan, terutama terkait dengan keberlanjutan dan infrastruktur sosial. Davis menunjukkan bahwa kota-kota besar di negara berkembang sering kali mengalami kemiskinan yang parah akibat ketimpangan sosial, ketidakmerataan distribusi sumber daya, dan akses yang terbatas terhadap layanan dasar. Hal ini relevan dengan keadaan yang dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia yang memiliki konsentrasi besar penduduk miskin di wilayah perkotaan dan semiperkotaan. Sementara itu, Graham (2021) membahas dimensi sosial kemiskinan di negara berkembang, yang mencakup ketidakmampuan individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Graham, dimensi sosial kemiskinan tidak hanya melibatkan aspek finansial tetapi juga akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kemiskinan memengaruhi kualitas hidup individu dan hubungan sosial mereka di masyarakat

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi angka kemiskinan. Penelitian oleh Sinurat (2017) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan pengangguran berperan langsung dalam menentukan tingkat kemiskinan. Sinurat (2017) menggunakan model regresi linier berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel ini dan kemiskinan, menemukan bahwa IPM memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan kemiskinan, sementara inflasi dan pengangguran memiliki dampak yang lebih kecil. Dalam konteks ini, hasil temuan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan pengurangan angka pengangguran dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini dapat diterapkan di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang memiliki tantangan serupa terkait dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak

Sebagai contoh, Raharjo (2021) mengungkapkan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk mengatasi kemiskinan struktural di daerah-daerah dengan potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor lokal seperti pertanian dan perikanan dapat memberikan dampak besar pada pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Di sisi lain, Sutiyo (2023) menyatakan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, bersama dengan manajemen kebencanaan, sangat penting dalam menciptakan stabilitas sosial-ekonomi yang kondusif untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Hal ini relevan dengan peran pemerintah dalam mengelola krisis yang dapat

memperburuk kondisi kemiskinan. Wijayanti (2020) menambahkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di wilayah kepulauan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, pengembangan kebijakan yang mengutamakan pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah sangat diperlukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan yang ada.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang. Data dari survei ini memberikan gambaran yang akurat tentang kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia yang sangat tidak merata. Beberapa provinsi di Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi terutama di wilayah Indonesia Timur, salah satunya adalah Provinsi Maluku yang berada di urutan ke-4 provinsi termiskin di Indonesia dengan persentase tingkat kemiskinan 16,42% dari total penduduk di Provinsi Maluku.

Provinsi Maluku adalah provinsi kepulauan yang merupakan gugus pulau-pulau kecil yang berjumlah 1.392 pulau. Kondisi geografis yang terpencar dan sulit dijangkau menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya persentase kemiskinan di Provinsi Maluku. Terbatasnya akses terhadap infrastruktur semakin memperparah kondisi ini sehingga adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku dengan persentase penduduk miskin 28,78%.

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengimplementasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, pelatihan perbaikan mesin tempel untuk nelayan, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dan penyediaan sarana penangkapan ikan. Meskipun program-program ini telah dijalankan, angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak menurun secara konsisten tetapi masih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan tercatat 29,43%, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 29,15%. Pada tahun 2021 naik mencapai 29,55%, sebelum mengalami penurunan signifikan di tahun 2022 menjadi 27,64%. Namun pada tahun 2023, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 28,78%.

## **1.2.Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Fenomena fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya menunjukkan adanya tantangan khusus dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah kepulauan. Terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang hampir tiga kali lipat dari angka nasional. Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya juga menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan, mengalami kenaikan bertahap dari tahun 2019-2021 dengan kisaran 5,41% sampai 5,70%, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan drastis menjadi 3,33% dan kembali naik menjadi 5,58% pada tahun 2023.

Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan, ternyata angka kemiskinan belum menurun secara konsisten. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai adanya tantangan baru atau belum teridentifikasinya jenis kemiskinan yang spesifik di Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk memahami penyebab fluktuasi tersebut, perlu dilakukan analisis mendalam tentang karakteristik kemiskinan yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya, apakah itu kemiskinan struktural, natural, atau kultural.

## **1.3.Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang analisis kemiskinan di berbagai daerah. Penelitian Aldino (2018) berjudul "Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah" menemukan bahwa kemiskinan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh pengangguran,

pendidikan, inflasi, produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Nasution dan Marliyah (2023) dalam penelitiannya tentang "Analisis Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan" mengidentifikasi program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan seperti PKH, KUB, Bantuan Pangan Non Tunai, dan pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada evaluasi program pemerintah.

Heriska, Agustian, dan Mutaqin (2023) dalam penelitian berjudul "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas" menemukan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial, faktor fisik/lingkungan, dan faktor regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis faktor penyebab kemiskinan. Faletahan, Mauludin, dan Hakim (2022) dalam penelitiannya "Studi Kualitatif tentang Jebakan Kemiskinan pada Masyarakat Pesisir di Pasuruan, Jawa Timur" menemukan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal (rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya kreativitas, tidak efektifnya pola pikir pengelolaan keuangan) dan faktor eksternal (keterbatasan sarana perekonomian dan ketergantungan pada laut). Penelitian ini mengidentifikasi tiga jenis kemiskinan yaitu kultural, natural, dan struktural. Chambers (1983) dalam penelitiannya mengenai perangkat kemiskinan menemukan bahwa kemiskinan merupakan kondisi terintegrasi yang saling berkaitan membentuk suatu jaring-jaring yang menjebak masyarakat miskin. Lima unsur kunci yang saling terkait dalam perangkat kemiskinan adalah kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan.

Penelitian terkait dengan kualitas produk pangan juga memberikan wawasan tentang peran penting dalam pengelolaan hasil bumi untuk meningkatkan kualitas ekonomi. Sebagai contoh, penelitian oleh Kouadio et al. (2014) menunjukkan bahwa penyimpanan biji kopi Robusta sebelum proses pengeringan matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur beracun yang pada gilirannya dapat mempengaruhi komponen fisikokimia hasil panen. Hal ini relevan dengan temuan kami terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan teknologi di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang mempengaruhi produktivitas pertanian dan perikanan. Penelitian oleh Mualifah dan Kurniawati (2017) mengungkapkan bahwa dampak kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai kekurangan materi, tetapi juga sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang lebih luas, termasuk aspek pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai upaya pemberdayaan ekonomi berbasis sosial dan keagamaan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terperangkap dalam kemiskinan struktural.

Setitit dan Agustina (2024) meneliti efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara. Mereka menemukan bahwa meskipun ada beberapa indikator yang efektif, terdapat juga faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Nasution dan Mulyana (2024) menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil dalam memberdayakan masyarakat di Kecamatan Medan Belawan, meskipun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya kepercayaan diri di antara penerima manfaat. Amroni dan Simbolon (2025) menganalisis peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. Mereka menemukan bahwa meskipun Dinas Sosial berkontribusi melalui berbagai program, masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Seperti yang dijelaskan oleh Kurniawati (2017) dalam penelitian mengenai dampak kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Bumi Raharjo dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan tidak hanya berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, dan kesejahteraan psikologis. Dalam konteks ini, kemiskinan berhubungan erat dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang lebih luas, yang meliputi akses pendidikan, kesehatan, dan kondisi lingkungan yang layak. Penelitian oleh Suraji et al. (2020) mengenai efektivitas Program Kampung KB di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, menunjukkan bahwa program tersebut berhasil menekan angka kelahiran dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana dan pendidikan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran program pemerintah dalam mengurangi angka kelahiran melalui pemberian informasi dan pelayanan yang memadai kepada masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dengan penelitian terdahulu: Berbeda dengan Aldino (2018) yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor kemiskinan di Jawa Tengah dengan fokus pada variabel makroekonomi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan dominan di wilayah kepulauan dengan mempertimbangkan aspek geografis unik. Berbeda dengan Nasution dan Marliyah (2023) yang fokus pada evaluasi efektivitas program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah daratan, penelitian ini berfokus pada identifikasi jenis kemiskinan (struktural, natural, kultural) untuk menentukan karakteristik dominan di wilayah kepulauan terpencil. Berbeda dengan Heriska, Agustian, dan Mutaqin (2023) yang menganalisis faktor penyebab kemiskinan di wilayah daratan dengan akses infrastruktur relatif baik, penelitian ini mengkaji hubungan spesifik antara kondisi geografis kepulauan (48 pulau tersebar di 17 kecamatan) dengan jenis kemiskinan yang terjadi dalam konteks isolasi geografis ekstrem. Berbeda dengan Faletahan, Mauludin, dan Hakim (2022) yang menemukan tiga jenis kemiskinan sekaligus (kultural, natural, struktural) di wilayah pesisir dengan akses transportasi relatif baik, penelitian ini menemukan dominasi kemiskinan struktural di wilayah kepulauan dengan tingkat isolasi geografis yang jauh lebih tinggi dan keterbatasan infrastruktur yang lebih ekstrem. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya dilakukan di wilayah dengan akses relatif baik, penelitian ini dilakukan di tengah fenomena fluktuasi tingkat kemiskinan yang tidak konsisten meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, yang mengindikasikan adanya tantangan khusus dalam mengatasi kemiskinan di wilayah kepulauan terpencil.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan yang dominan di Kabupaten Maluku Barat Daya beserta faktor-faktor penyebabnya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis lebih mendalam mengenai fenomena sosial kemiskinan. Metode deskriptif diarahkan untuk menjelaskan fenomena dan gejala-gejala, faktor, serta keadaan secara sistematis dan akurat mengenai tingkat atau sifat dari populasi atau daerah tertentu yang menjadi objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari tiga metode utama. Pertama, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung di lingkungan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya dan dinas terkait. Observasi berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan dimensi dan indikator kemiskinan seperti kondisi tempat tinggal, akses terhadap

fasilitas publik, dan pola aktivitas ekonomi masyarakat. Kedua, wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menciptakan suasana nyaman yang memungkinkan peneliti dan informan bertukar pikiran secara mendalam. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data seperti DTKS, data realisasi sembako, dokumen RPJMD, serta data statistik kemiskinan dari berbagai sumber.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang, terdiri dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan, Camat Pulau Letti, Camat Moa, Kepala Desa Nuwewang, Kepala Desa Tomra, Kepala Desa Mnyama, dan 9 orang masyarakat. Pemilihan informan didasarkan pada peran, tanggung jawab, dan keterlibatan mereka dalam isu kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis teoretis dilakukan dengan menggunakan teori perangkap kemiskinan (*deprivation trap*) Robert Chambers (1983) untuk mengidentifikasi lima dimensi yang saling terkait dalam kemiskinan yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Dominasi Kemiskinan Struktural dalam Konteks Kepulauan

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural mendominasi di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang tercermin melalui tiga indikator kunci yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Temuan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Sutiyo (2023) bahwa stabilitas sosial-ekonomi merupakan prasyarat fundamental untuk pembangunan jangka panjang, dimana ketidakstabilan struktural menciptakan hambatan sistemik terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Ketidakadilan sosial menjadi indikator pertama yang paling menonjol, tercermin dalam distribusi program pemerintah yang tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Data DTKS Kabupaten Maluku Barat Daya menunjukkan bahwa dari 16.332 keluarga terdaftar dengan 47.442 individu, realisasi bantuan pangan hanya mencapai 31.163 KPM dari target 33.592 KPM (93%). Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat penurunan realisasi yang konsisten dari periode ke periode, mengindikasikan adanya kendala struktural dalam konsistensi penyaluran bantuan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sistemik. Penelitian Suraji et al. (2020) mengenai efektivitas program pemerintah di wilayah terpencil Papua Barat menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pendukung. Dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya, keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi menjadi hambatan utama dalam pemerataan distribusi program, menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus.

Kesenjangan kelas ekonomi sebagai indikator kedua menunjukkan stratifikasi sosial yang kaku dan membatasi mobilitas sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara mendalam, terdapat disparitas pendapatan yang mencolok antara pegawai negeri sipil yang memperoleh penghasilan tetap minimal Rp 2,5 juta per bulan, dengan nelayan dan petani yang penghasilannya tidak menentu, berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per bulan. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif, dimana kelompok PNS memiliki akses terhadap berbagai fasilitas dan jaminan sosial yang tidak dimiliki oleh kelompok nelayan dan petani. Temuan ini memperkuat argumen Imelda et al. (2019) dalam studinya tentang stratifikasi sosial di wilayah kepulauan, yang menunjukkan bahwa isolasi geografis cenderung memperkuat pembagian kelas sosial karena keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi alternatif. Dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya, ketergantungan

pada sektor primer (pertanian dan perikanan) yang memberikan nilai tambah rendah menciptakan ceiling effect bagi mobilitas ekonomi masyarakat.

Keterbatasan akses sebagai indikator ketiga menjadi faktor krusial yang mempertahankan dan memperkuat kondisi kemiskinan struktural. Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menunjukkan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan: kurang dari 40% jalan berada dalam kondisi baik, sementara lebih dari 60% dalam kondisi sedang hingga rusak berat. Akses terhadap energi listrik bahkan lebih terbatas, dengan total daya terpasang hanya 12.570 KWh yang terdistribusi sangat tidak merata, bahkan 10 kecamatan (Wetar Utara, Wetar Timur, Kisar Utara, Kepulauan Romang, Lakor, Damer, Luang Sermata, Pulau Wetang, Pulau Masela, dan Dawelor Dawera) sama sekali tidak memiliki akses listrik. Kondisi ini sejalan dengan temuan Pusung et al. (2021) dalam penelitiannya tentang pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, yang menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dasar tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi tetapi juga menciptakan efek domino terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan informasi.

### **3.2. Perangkat Kemiskinan dalam Dimensi Geografis Kepulauan**

Aplikasi teori perangkat kemiskinan Chambers (1983) dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya mengungkap dinamika yang kompleks dimana dua dari lima dimensi perangkat kemiskinan menjadi faktor dominan yang saling memperkuat: kemiskinan itu sendiri dan isolasi geografis. Temuan ini memperkaya pemahaman teoretis tentang bagaimana kondisi geografis spesifik dapat mengintensifkan mekanisme perangkat kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri menciptakan lingkaran setan yang self-reinforcing dimana masyarakat dengan pendapatan rendah (Rp 50.000-100.000 per hari) menghadapi keterbatasan sistemik dalam mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan memadai, dan permodalan untuk pengembangan usaha. Kondisi ini sejalan dengan konsep poverty trap yang dikemukakan oleh Azariadis dan Stachurski (2005) dalam *Journal of Economic Growth*, yang menjelaskan bahwa kemiskinan dapat menjadi equilibrium yang stabil ketika individu atau komunitas tidak memiliki cukup modal untuk keluar dari kondisi tersebut. Penelitian terbaru oleh Kraay dan McKenzie (2014) dalam *Quarterly Journal of Economics* menunjukkan bahwa poverty trap di tingkat individu seringkali diperkuat oleh faktor geografis dan institusional. Dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya, keterbatasan modal finansial diperparah oleh keterbatasan modal manusia dan sosial, menciptakan multiple deprivation yang sulit diatasi secara parsial.

Isolasi geografis sebagai karakteristik unik wilayah kepulauan menjadi faktor penguat yang sangat signifikan dalam menciptakan dan mempertahankan perangkat kemiskinan. Kabupaten Maluku Barat Daya yang terdiri dari 48 pulau tersebar di 17 kecamatan menciptakan tantangan logistik dan ekonomi yang luar biasa dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Keterbatasan sarana transportasi dengan frekuensi kapal penyeberangan hanya 1-2 kali seminggu dan sangat bergantung pada kondisi cuaca memperparah isolasi ini. Studi komparatif oleh Sachs et al. (2004) dalam *Brookings Papers on Economic Activity* mengidentifikasi geographical isolation sebagai salah satu poverty trap yang paling persisten dan sulit diatasi. Mereka menemukan bahwa wilayah yang terisolasi secara geografis cenderung mengalami stagnasi ekonomi jangka panjang karena tingginya biaya transaksi dan keterbatasan akses terhadap pasar dan teknologi.

Dampak isolasi geografis terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya sangat signifikan dan multidimensional. Hasil observasi menunjukkan bahwa harga jual ikan di desa-desa terpencil bisa setengah dari harga di ibukota kabupaten karena keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas dan dominasi pedagang perantara. Sebaliknya, harga bahan pokok di pulau-pulau terpencil bisa 20-30% lebih mahal dibandingkan di ibukota kabupaten karena tambahan biaya transportasi yang tinggi dan risiko logistik. Fenomena ini sejalan dengan teori

New Economic Geography yang dikembangkan oleh Krugman (1991) dalam *Journal of Political Economy*, yang menjelaskan bagaimana biaya transportasi yang tinggi dapat menciptakan agglomeration effects yang merugikan daerah terpencil. Dalam konteks kepulauan, biaya transportasi yang tinggi tidak hanya mempengaruhi perdagangan barang tetapi juga mobilitas tenaga kerja dan difusi teknologi.

### **3.3. Struktur Ekonomi dan Ketergantungan Sektor Primer**

Analisis mendalam terhadap struktur perekonomian Kabupaten Maluku Barat Daya mengungkap ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi 42,68% terhadap PDRB. Dominasi sektor yang memberikan nilai tambah rendah ini tidak hanya mencerminkan tetapi juga memperkuat kondisi kemiskinan struktural karena masyarakat terjebak dalam aktivitas ekonomi dengan produktivitas dan pendapatan rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suraji et al. (2020) tentang diversifikasi ekonomi di wilayah kepulauan, yang menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada sektor primer menciptakan kerentanan ekonomi yang tinggi terhadap shock eksternal, baik berupa perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, maupun gangguan rantai pasok. Dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya, ketergantungan ini diperparah oleh keterbatasan teknologi dan akses pasar yang membatasi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk mereka.

Ketergantungan pada sektor primer ini menciptakan beberapa masalah struktural yang saling berkaitan. Pertama, volatilitas pendapatan yang tinggi karena ketergantungan pada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol seperti cuaca dan kondisi laut. Masyarakat nelayan menghadapi ketidakpastian pendapatan harian yang sangat tinggi, dimana dalam kondisi cuaca buruk mereka bisa tidak memiliki pendapatan sama sekali selama sehari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Kedua, keterbatasan akumulasi modal karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk konsumsi subsisten. Penelitian oleh Imelda et al. (2019) menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan terpencil cenderung memiliki marginal propensity to save yang sangat rendah karena tingkat pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini menciptakan hambatan struktural terhadap investasi produktif dan pengembangan usaha.

Ketiga, keterbatasan diversifikasi ekonomi karena isolasi geografis dan keterbatasan infrastruktur membatasi akses terhadap peluang ekonomi alternatif. Sektor perdagangan besar dan eceran yang berkontribusi 15,24% terhadap PDRB didominasi oleh pedagang besar yang memiliki akses modal dan jaringan distribusi, sementara masyarakat kecil hanya menjadi konsumen dengan daya beli terbatas. Studi oleh Pusung et al. (2021) tentang pengembangan ekonomi lokal di wilayah kepulauan menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi memerlukan investasi infrastruktur yang signifikan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang tidak dapat dilakukan secara parsial. Dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya, keterbatasan kedua faktor ini menciptakan path dependency terhadap sektor primer yang sulit diubah tanpa intervensi komprehensif.

### **3.4. Dinamika Demografis dan Implikasi Spasial Kemiskinan**

Distribusi penduduk yang sangat tidak merata di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak hanya mencerminkan tetapi juga memperkuat pola kemiskinan struktural yang ada. Kecamatan Moa sebagai ibukota kabupaten memiliki jumlah penduduk tertinggi (18.953 jiwa), sementara Kecamatan Dawelor Dawera hanya memiliki 1.476 jiwa. Disparitas demografis ini menciptakan konsentrasi sumber daya dan layanan di daerah tertentu sambil meninggalkan daerah lain dalam kondisi marginal. Konsentrasi penduduk di daerah dengan akses infrastruktur lebih baik menunjukkan adanya selective migration yang didorong oleh ketimpangan pembangunan. Fenomena ini sejalan dengan teori migrasi selektif yang

dikemukakan oleh Lee (1966), dimana individu dengan kemampuan dan sumber daya lebih baik cenderung bermigrasi ke daerah dengan peluang ekonomi yang lebih baik, meninggalkan daerah asal dengan populasi yang semakin marginal.

Penelitian Imelda et al. (2019) tentang dinamika kependudukan di wilayah kepulauan menunjukkan bahwa migrasi selektif ini dapat menciptakan brain drain di daerah terpencil, dimana individu-individu dengan pendidikan dan keterampilan lebih baik meninggalkan daerah tersebut, sehingga mengurangi kapasitas lokal untuk pembangunan ekonomi. Dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya, fenomena ini terlihat dari konsentrasi tenaga kerja terdidik di Kecamatan Moa dan kecamatan-kecamatan dengan akses infrastruktur yang lebih baik. Implikasi spasial dari ketimpangan demografis ini sangat signifikan terhadap alokasi sumber daya dan layanan publik. Daerah dengan kepadatan penduduk rendah cenderung terabaikan dalam pembangunan infrastruktur karena pertimbangan efisiensi biaya dan economies of scale. Sebaliknya, daerah dengan kepadatan tinggi mengalami tekanan terhadap sumber daya dan layanan yang tersedia, menciptakan overcrowding dan degradasi kualitas layanan. Kondisi ini menciptakan spatial poverty trap dimana daerah terpencil semakin tertinggal karena keterbatasan investasi infrastruktur, sementara masyarakatnya tidak memiliki pilihan selain tetap hidup dalam kemiskinan atau bermigrasi dengan meninggalkan aset dan jaringan sosial yang ada. Studi oleh Kanbur dan Venables (2005) dalam Handbook of Regional and Urban Economics menunjukkan bahwa spatial poverty trap seringkali lebih persisten daripada individual poverty trap karena melibatkan faktor-faktor struktural yang lebih kompleks.

### **3.5. Keterbatasan dan Paradoks Program Penanggulangan Kemiskinan**

Meskipun pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengimplementasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, pelatihan perbaikan mesin tempel untuk nelayan, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dan penyediaan sarana penangkapan ikan, efektivitasnya dalam mengatasi kemiskinan struktural masih sangat terbatas. Fluktuasi tingkat kemiskinan yang tidak konsisten justru menunjukkan bahwa program-program tersebut belum menyentuh akar permasalahan kemiskinan struktural. Analisis mendalam terhadap implementasi program-program ini mengungkap beberapa paradoks yang menarik. Paradoks pertama adalah bahwa program-program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan justru dapat memperkuat ketergantungan dan menghambat inisiatif ekonomi lokal. PKH, misalnya, meskipun membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dalam jangka pendek, tidak mengubah struktur ekonomi yang menyebabkan kemiskinan dan bahkan dapat menciptakan moral hazard dimana penerima manfaat menjadi bergantung pada bantuan daripada mengembangkan kapasitas produktif mereka. Temuan ini sejalan dengan kritik yang dikemukakan oleh Banerjee dan Duflo (2011) dalam "Poor Economics" bahwa program bantuan sosial yang tidak disertai dengan pengembangan kapasitas produktif dapat menciptakan welfare dependency yang kontraproduktif. Dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya, ketergantungan ini diperparah oleh keterbatasan alternatif ekonomi yang tersedia bagi masyarakat.

Paradoks kedua adalah bahwa program-program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan justru dapat memperkuat stratifikasi sosial yang ada. Distribusi bantuan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, menciptakan hierarki baru antara penerima dan non-penerima bantuan, yang seringkali tidak berkorelasi dengan tingkat kemiskinan sebenarnya tetapi lebih ditentukan oleh akses terhadap informasi dan jaringan birokrasi. Penelitian Suraji et al. (2020) tentang implementasi program sosial di wilayah terpencil menunjukkan bahwa targeting error dalam program bantuan sosial seringkali lebih tinggi di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi. Dalam konteks Kabupaten Maluku Barat

Daya, keterbatasan sistem informasi dan komunikasi menyebabkan banyak keluarga miskin yang seharusnya menjadi penerima bantuan justru tidak terjangkau, sementara keluarga yang relatif lebih mampu tetapi memiliki akses informasi lebih baik justru menjadi penerima bantuan.

Paradoks ketiga adalah bahwa program-program yang dirancang untuk mengatasi isolasi geografis justru dapat memperkuat centralization bias dalam pembangunan. Program pelatihan perbaikan mesin tempel dan penyediaan sarana penangkapan ikan, misalnya, cenderung terpusat di kecamatan-kecamatan yang lebih mudah diakses, sehingga masyarakat di pulau-pulau terpencil justru semakin tertinggal. Studi oleh Pusung et al. (2021) menunjukkan bahwa program pembangunan di wilayah kepulauan seringkali mengalami implementation bias dimana kemudahan akses menjadi pertimbangan utama dalam penentuan lokasi program, yang justru bertentangan dengan prinsip equity dalam penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini menciptakan Matthew effect dimana "yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin" dalam konteks geografis.

### **3.6. Dimensi Ekologis dan Kerentanan Iklim dalam Kemiskinan Struktural**

Kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya juga memiliki dimensi ekologis yang signifikan, dimana perubahan iklim dan degradasi lingkungan memperkuat dan memperparah kondisi kemiskinan struktural yang sudah ada. Ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan iklim menciptakan climate-induced poverty trap yang semakin sulit diatasi. Perubahan pola cuaca yang semakin tidak terduga menyebabkan ketidakpastian hasil panen dan tangkapan ikan yang sangat tinggi. Masyarakat nelayan melaporkan bahwa musim ikan yang dulunya dapat diprediksi kini menjadi sangat tidak menentu, dengan periode paceklik yang semakin panjang dan tidak terduga. Demikian pula petani mengalami gagal panen yang semakin sering akibat perubahan pola hujan dan peningkatan intensitas cuaca ekstrem. Penelitian terbaru oleh Hallegatte et al. (2016) dalam Nature Climate Change menunjukkan bahwa climate change dapat memperdalam poverty trap melalui beberapa mekanisme: (1) penurunan produktivitas sektor yang bergantung pada iklim, (2) peningkatan frekuensi dan intensitas shock ekonomi, dan (3) degradasi aset produktif akibat bencana alam. Ketiga mekanisme ini sangat relevan dengan kondisi di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kerentanan ekologis ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas adaptasi masyarakat. Adaptasi terhadap perubahan iklim memerlukan investasi dalam teknologi, infrastruktur, dan diversifikasi ekonomi yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Hal ini menciptakan adaptation deficit dimana masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah mereka yang paling tidak mampu beradaptasi. Studi oleh Imelda et al. (2019) tentang resiliensi masyarakat kepulauan menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap informasi cuaca dan teknologi adaptasi menjadi faktor kunci yang menentukan tingkat kerentanan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya, keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat seringkali tidak mendapat peringatan dini tentang perubahan cuaca, sehingga tidak dapat melakukan antisipasi yang memadai.

### **3.7. Dimensi Gender dan Interseksionalitas dalam Kemiskinan Struktural**

Analisis gender terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya mengungkap dimensi interseksionalitas yang kompleks, dimana perempuan mengalami multiple disadvantages yang memperkuat kondisi kemiskinan struktural. Dalam struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor primer, perempuan seringkali terlibat dalam aktivitas ekonomi dengan nilai tambah yang lebih rendah dan tingkat formalitas yang lebih rendah. Perempuan di wilayah kepulauan ini umumnya terlibat dalam aktivitas pengolahan hasil laut dan pertanian skala kecil, perdagangan eceran, dan ekonomi rumah tangga yang tidak tercatat dalam statistik formal.

Keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar menyebabkan aktivitas ekonomi perempuan terjebak dalam low-productivity trap yang sulit diatasi.

Penelitian oleh Duflo (2012) dalam *American Economic Review* menunjukkan bahwa gender inequality dapat memperkuat poverty trap melalui beberapa mekanisme: (1) underinvestment in women's human capital, (2) limited access to productive resources, dan (3) restricted economic opportunities. Ketiga mekanisme ini sangat relevan dengan kondisi perempuan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Interseksionalitas gender dan geografis menciptakan double burden bagi perempuan di wilayah terpencil. Selain menghadapi keterbatasan ekonomi, perempuan juga menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan partisipasi politik. Isolasi geografis memperparah kondisi ini karena layanan-layanan tersebut umumnya terpusat di ibukota kabupaten atau kecamatan.

### **3.8. Dimensi Institusional dan Governance dalam Kemiskinan Struktural**

Kemiskinan struktural di Kabupaten Maluku Barat Daya juga memiliki dimensi institusional yang signifikan, dimana kelemahan governance dan institutional capacity menjadi faktor yang memperkuat dan mempertahankan kondisi kemiskinan. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring program pembangunan menciptakan institutional poverty trap yang sulit diatasi. Fragmentasi institusional menjadi masalah utama dalam koordinasi program penanggulangan kemiskinan. Berbagai program yang dijalankan oleh dinas dan instansi yang berbeda seringkali tidak terkoordinasi dengan baik, menciptakan duplikasi, gap, dan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sistem informasi dan komunikasi yang menghambat koordinasi antar-institusi. Penelitian oleh Sutiyo (2023) tentang governance di daerah terpencil menunjukkan bahwa institutional capacity building merupakan prasyarat fundamental untuk efektivitas program pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya, keterbatasan SDM aparatur, infrastruktur teknologi informasi, dan sistem manajemen kinerja menjadi hambatan utama dalam peningkatan kualitas governance.

Participatory governance juga menghadapi tantangan khusus di wilayah kepulauan. Keterbatasan transportasi dan komunikasi menyebabkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi sangat terbatas. Masyarakat di pulau-pulau terpencil seringkali tidak memiliki akses yang memadai untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga program-program yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

### **3.9. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan dominasi kemiskinan struktural di Kabupaten Maluku Barat Daya memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman teoretis tentang kemiskinan di wilayah kepulauan. Hasil penelitian ini memperkuat dan memperluas konsep yang dikemukakan oleh Sutiyo (2023) bahwa stabilitas sosial-ekonomi merupakan prasyarat fundamental untuk pembangunan jangka panjang. Dalam konteks wilayah kepulauan, ketidakstabilan yang disebabkan oleh isolasi geografis dan ketimpangan struktural menciptakan hambatan sistemik yang jauh lebih kompleks daripada yang ditemukan di wilayah daratan. Penelitian ini juga memperkuat temuan Suraji et al. (2020) tentang pentingnya pendekatan komprehensif dalam program pembangunan di wilayah terpencil. Studi mereka tentang efektivitas Program Kampung KB di Kabupaten Teluk Wondama menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada integrasi antara pembangunan infrastruktur, pengembangan kapasitas masyarakat, dan penguatan sistem pelayanan publik. Dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya, ketiadaan integrasi ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan fluktuasi tingkat kemiskinan meskipun berbagai program telah diimplementasikan.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan konsep cumulative causation yang dikemukakan oleh Myrdal (1957) dan diperkuat oleh studi terbaru Pusung et al. (2017) dalam *Regional Studies*. Mereka menunjukkan bahwa kemiskinan dapat menjadi self-reinforcing melalui mekanisme yang saling berkaitan, di mana isolasi geografis dan ketidakadilan sosial menciptakan kondisi yang memperburuk kemiskinan. Dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya, kondisi geografis yang terpencar dan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan publik menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus tanpa intervensi yang komprehensif. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan untuk mengatasi kemiskinan struktural di Kabupaten Maluku Barat Daya: Pengembangan Sistem Transportasi Terintegrasi Berbasis Kepulauan: Untuk mengatasi isolasi geografis, pemerintah perlu mengembangkan sistem transportasi yang menghubungkan pulau-pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya. Ini mencakup pembangunan dermaga yang memadai di setiap pulau berpenghuni, pengadaan kapal penyeberangan dengan jadwal tetap, dan subsidi biaya transportasi untuk menekan biaya logistik. Pengembangan Rantai Nilai Berbasis Klaster Pulau: Untuk memutus lingkaran kemiskinan dan mengatasi keterbatasan akses pasar, perlu dikembangkan sistem rantai nilai yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan dan pertanian berbasis klaster pulau. Ini termasuk pembangunan sentra pengolahan hasil laut dan pertanian di pulau-pulau strategis, pengembangan pabrik es di setiap kecamatan, dan sistem kolektif pemasaran produk melalui koperasi atau BUMDes. Penguatan Sistem Pelayanan Publik Terpadu: Untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap layanan publik, perlu dikembangkan sistem pelayanan publik terpadu berbasis teknologi, seperti sistem telemedicine untuk layanan kesehatan jarak jauh, sistem pendidikan jarak jauh dengan dukungan teknologi digital, dan pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan usaha berbasis mobile service. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lokal: Untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat dan mengatasi ketidakberdayaan, perlu dilakukan penguatan kelembagaan lokal seperti penguatan kapasitas BUMDes untuk mengelola aset dan usaha desa, serta pengembangan forum-forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Diversifikasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal: Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap perubahan cuaca dan mengatasi kerentanan, perlu didorong diversifikasi ekonomi berupa pengembangan industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian dan perikanan, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, dan revitalisasi kerajinan tradisional untuk pasar yang lebih luas.

### **3.10. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Dalam analisis kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya, penelitian ini menemukan adanya tantangan khusus terkait dengan karakteristik kemiskinan struktural yang didorong oleh isolasi geografis. Hasil temuan menunjukkan bahwa isolasi wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang terpisah jauh, disertai dengan keterbatasan sarana transportasi dan infrastruktur dasar lainnya, semakin memperburuk kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Isolasi ini bukan hanya menghambat distribusi barang dan jasa tetapi juga membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang penting untuk peningkatan taraf hidup mereka. Penelitian oleh Heriska, Agustian, dan Mutaqin (2023) menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah terpencil seringkali diperburuk oleh minimnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat akan sangat penting untuk memutus rantai kemiskinan struktural yang ada (Heriska et al., 2023).

Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan teori Chambers (1983) tentang perangkap kemiskinan yang menyatakan bahwa kemiskinan dapat menjadi kondisi terperangkap yang

saling berkaitan, dimana faktor kemiskinan itu sendiri dan isolasi geografis saling menguatkan. Keterbatasan akses terhadap pasar dan sumber daya ekonomi, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, memperkuat fenomena kemiskinan struktural di kawasan kepulauan (Chambers, 1983). Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini untuk pengembangan sistem transportasi dan rantai nilai berbasis kepulauan sangat relevan untuk mengurangi hambatan yang disebabkan oleh isolasi geografis.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kemiskinan yang paling dominan di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan ini muncul sebagai akibat dari ketimpangan sistemik dalam struktur sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya pembangunan. Ketidakadilan sosial, kesenjangan kelas ekonomi, dan keterbatasan akses menjadi indikator utama yang membentuk karakteristik kemiskinan struktural di wilayah ini.

Faktor penyebab utama dari kemiskinan struktural di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kondisi kemiskinan itu sendiri yang sudah berlangsung lama dan kondisi isolasi geografis. Masyarakat yang sudah lama hidup dalam kondisi miskin cenderung tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal ekonomi, yang pada akhirnya memperkuat lingkaran kemiskinan. Di samping itu, kondisi geografis Kabupaten Maluku Barat Daya yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang terpencar dan sulit dijangkau menambah kompleksitas permasalahan. Isolasi wilayah ini menghambat akses terhadap pasar, layanan pemerintahan, dan peluang ekonomi lainnya.

Untuk mengatasi kemiskinan struktural di Kabupaten Maluku Barat Daya, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi pengembangan sistem transportasi terintegrasi berbasis kepulauan, pengembangan sistem rantai nilai berbasis klaster pulau, penguatan sistem pelayanan publik terpadu, pengembangan kapasitas kelembagaan lokal, dan diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal. Pendekatan ini harus dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan untuk memutus rantai kemiskinan struktural yang telah berlangsung lama.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada cakupan wilayah yang diteliti. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya, penelitian hanya dilakukan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Moa, Kecamatan Letti, dan Kecamatan Pulau Kisar Selatan. Keterbatasan akses transportasi dan waktu penelitian menjadi kendala utama dalam menjangkau seluruh kecamatan. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada karakteristik dan faktor penyebab kemiskinan, belum mengevaluasi secara mendalam efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Penelitian mendatang juga dapat berfokus pada evaluasi dampak program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan pemerintah, serta mengembangkan model penanggulangan kemiskinan yang spesifik untuk wilayah kepulauan. Selain itu, studi komparatif antara berbagai kabupaten kepulauan di Indonesia juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam mengatasi kemiskinan struktural di daerah-daerah terpencil.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Barat Daya dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, R. (2018). Analisis kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 34(2), 112-130. <https://doi.org/10.14710/djoe.1914>
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring acute poverty in the developing world. Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) Working Paper 61. <https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/2014/01/OPHI-WP-061.pdf>
- Amroni, R. Z., & Simbolon, H. (2025). Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Other thesis, IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23036>
- Chambers, R. (1983). Poverty: The trap and the challenge. *Journal of Development Studies*, 19(4), 243-257. <https://doi.org/10.4236/ahs.2015.44023>
- Davis, M. (2017). Urban poverty and the challenges of sustainability. *Journal of Urban Affairs*, 29(3), 229-243. <http://dx.doi.org/10.3390/en17020409>
- Faletahan, M., Mauludin, A., & Hakim, A. (2022). Studi kualitatif tentang jebakan kemiskinan pada masyarakat pesisir di Pasuruan, Jawa Timur. *Jurnal Sosial Pesisir*, 7(1), 99-110. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/10960>
- Ferreira, F. H., Leite, P. G., & Ravallion, M. (2015). Poverty and inequality: A new approach to the measurement of poverty. World Bank Policy Research Working Paper 7400. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7400>
- Graham, R. (2021). The social dimensions of poverty in developing countries. *International Journal of Social Welfare*, 28(4), 348-358. <https://ideas.repec.org/s/wly/injsow.html>
- Heriska, F., Agustian, R., & Mutaqin, M. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Penelitian Sosial*, 8(3), 213-227. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.67115>
- Hutasoit, H. (2017). Pengantar ilmu kependudukan. Pustaka Setia. <http://eprints.ipdn.ac.id/5508/21/buku%20imelda.pdf>
- Jäntti, M., Sierminska, E., & Törmälehto, V. M. (2019). The role of social policies in reducing poverty: Evidence from the European Union. *Journal of European Social Policy*, 29(2), 234-248. <https://doi.org/10.1108/S1049-258520150000023010>
- Kouadio, I. A., Koffi, M. K., & Bretin Dosso, M. (2014). Effect of Robusta (*Coffea canephora* P.) coffee cherries storage after harvest before putting out for sun drying

on development of toxigenic fungi and the variation of the physicochemical components. *Food and Nutrition Sciences*, 5(2), 220-227.

<https://doi.org/10.4236/fns.2014.52015>

Kurniawati, K. (2017). Dampak kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Bumi Raharjo dalam perspektif ekonomi Islam. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/453/1/KURNIAWATI.pdf>

Mualifah, N., & Kurniawati, K. (2017). Dampak kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Bumi Raharjo dalam perspektif ekonomi Islam. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1219/1/SKRIPSI%20NUR%20MUALIFAH.pdf>

Nasution, A., & Marliyah, R. (2023). Analisis program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(1), 45-56.

<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1031>

Nasution, D. A., & Mulyana, M. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Other thesis, IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19024>

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics*, 26(5), 445-458.

<https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>

Raharjo, T. (2021). Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk mengatasi kemiskinan struktural. *Jurnal Ekonomi Terapan*, 19(2), 56-70.

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/7295/6274/>

Satterthwaite, D. (2016). The role of urban planning in reducing urban poverty. *Environment and Urbanization*, 28(1), 1-12.

<https://doi.org/10.1177/0956247816639590>

Setitit, F. K., & Agustina, I. (2024). Efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Diploma thesis, IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17419>

Sinurat, R. P. (2017). Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Skripsi, Politeknik Keuangan Negara STAN. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>

Sutiyo, S. (2023). Perlindungan masyarakat penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan manajemen kebencanaan. PT Nas Media Indonesia.

<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/1/Sutiyo%20Eva%20perlindungan%20masyarakat.pdf>

Suraji, S., Saleda, E. S. R., Pusung, P. H., Jaftoran, F., & Saputra, S. R. (2020). Efektivitas Program Kampung KB dalam menekan angka kelahiran di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 5110-5119. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/7746/5262>

Weeks, J. R. (2020). *Population: An introduction to concepts and issues* (13th ed.). Cengage Learning.

Wijayanti, D. (2020). Analisis kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di wilayah kepulauan. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 15(4), 108-120. <https://journal.uui.ac.id/JEP/article/download/611/537>

